

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Impilkasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Hestu Ciptohandoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Dahlan Thalib dkk, 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Joko J. Prithatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Lance Castles, 2004, *Pemilu 2004, Dalam Konteks Komparatif & Historis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Leo Agustino. 2009. *Pemilukada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mahkamah Konstitusi RI, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

Melvin I. Urofsky dalam Harsono Suwardi dkk, 2002 *Politik, Demokrasi dan Manajemen Komunikasi*, Galang Press, Yogyakarta.

Muhammad Asfar. 2006. *Mendesain Managemen Pemilukada*, Pustaka Eureka, Surabaya.

Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Bumi Imtitama Sejahtera, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Kencana, Jakarta.

Rozali Abdullah, 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

## **B. Internet:**

Anonim, *Pengertian Kepala Daerah Tugas Wewenang Proses Pemilihan dan Undang-Undangnya*,  
<http://artikelpengertianmakalah.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-kepala-daerah-tugas-wewenang.html>

BBC Indonesia, “Tujuh hal yang perlu Anda ketahui tentang Pilkada 2015”,  
[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/12/151208\\_indonesia\\_Pemilukada\\_explainer](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151208_indonesia_Pemilukada_explainer).

M Iqbal, *Ini 5 Keputusan KPU Sikapi Putusan MK Soal Calon Tunggal*,  
<http://news.detik.com/berita/3031684/ini-5-keputusan-kpu-sikapi-putusan-mk-soal-calon-tunggal>.

Mahkamah Konstitusi, “Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi”,  
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>.

Matias Toto Suryaningtyas, <http://print.kompas.com/baca/2015/09/30/Kejar-Pilkada-2015%2c-Tiga-Kabupaten-dengan-Calon-Tu>.

<http://pustakailmuhukum.blogspot.co.id/p/kedaulatan-ilmu-negara.html>

<http://kbbi.web.id/demokrasi>

<http://www.pengertian.org/2015/07/pengertian-demokrasi-secara-umum.html>

<http://nasional.sindonews.com/read/1069533/18/catatan-pilkada-serentak-1450160158>

<http://kpu.jabarprov.go.id/assets/data/artikel/PressRelease.pdf>.

### **C. Jurnal:**

Mariyadi Faqih, Juni 2010, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Nanang Sri Darmadi, Agustus 2011, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia* dalam Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Semarang.

Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010.

Zaqiu Rahman, *Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilukada, Perluakah Diatur Dalam Perppu?*, Jurnal Hukum Rechts Vinding (Media Pembinaan Hukum Nasional), 16 September 2015.

### **D. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.